

Transparansi Laporan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Daniel Awallana Syafi'i Putra^{1*}, Maxion Sumtaky²

^{1,2} Akuntansi, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64, Malang 65146, Indonesia

Email : danielawallana@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4188>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 3 Jan 2026

Kata Kunci:

Efektivitas;
Dana;
Keuangan;
Transparansi.

Keywords:

Effectiveness;
Funds;
Finance;
Transparency.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran laporan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui forum Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, serta publikasi infografis APBDes dan penggunaan media digital seperti WhatsApp yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Efektivitas pengelolaan tercermin dari tingkat serapan anggaran rata-rata 82,17% yang termasuk kategori efektif, dengan dukungan tata kelola berbasis Siskeudes, penerapan padat karya, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengawasan kegiatan. Temuan juga menunjukkan bahwa rincian laporan keuangan yang lengkap dan mudah dipahami meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat perencanaan partisipatif, serta mendorong rasionalisasi anggaran sehingga mengurangi potensi pemborosan. Secara keseluruhan, laporan keuangan desa berperan penting dalam memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga peningkatan kualitas akses informasi, profesionalisme aparatur, dan konsistensi penerapan standar pelaporan diperlukan untuk mendukung tata kelola desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

This study aims to analyze the role of village financial statements in increasing the transparency and effectiveness of village fund management in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency. The method used is qualitative descriptive through interviews, observations, and the review of documents such as APBDes, budget realization reports, and accountability reports. Data are analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that transparency is realized through the Musdus, Musdes, and Musrenbangdes forums, as well as the publication of APBDes infographics and the use of digital media such as WhatsApp that facilitates access to information for the public. The effectiveness of management is reflected in the average budget absorption rate of 82.17% which is included in the effective category, with the support of Siskeudes-based governance, labor-intensive implementation, and community participation in the implementation and supervision of activities. The findings also show that complete and easy-to-understand financial statement details increase public trust, strengthen participatory planning, and encourage budget rationalization to reduce the potential for waste. Overall, village financial reports play an important role in strengthening the transparency and effectiveness of village fund management, so that improving the quality of information access, professionalism of apparatus, and consistency in the implementation of reporting standards are needed to support accountable and sustainable village governance.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Daniel Awallana Syafi'i Putra et al (2025). Transparansi Laporan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. 3(4). 16090-16098. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4188>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa karena desa merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Upaya pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat membutuhkan kontribusi optimal dari seluruh desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pembangunan (Pasya & Handoko, 2025). Namun, realitas lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan pemerintah dan kapasitas desa dalam melaksanakan program pembangunan. Sebagian desa masih menghadapi persoalan terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta kualitas tata kelola keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam otonomi daerah belum berjalan secara optimal (Dewi & Nugrahanti, 2025).

Dalam kerangka otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi lokal, merencanakan pembangunan, serta mengelola keuangan desa secara mandiri. Dukungan dana desa yang terus meningkat seharusnya mampu memperkuat kapasitas desa dalam mengembangkan program-program strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramudita et al., 2024). Namun, peningkatan kapasitas fiskal desa juga menuntut pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa tata kelola yang baik, dana desa berpotensi tidak tepat sasaran, menimbulkan penyimpangan, atau tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan masyarakat (Mojo & Rahayu, 2023). Karena itu, implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, dan ketertiban anggaran menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan dana desa adalah masih terbatasnya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta kurang optimalnya proses pertanggungjawaban keuangan yang disajikan melalui laporan keuangan desa (Edelwis, 2022). Laporan keuangan yang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak mudah diakses dapat menghambat partisipasi masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, variasi sumber pendapatan desa, seperti dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil, bantuan pemerintah, dan pendapatan asli desa, menuntut adanya proses pencatatan dan pelaporan yang jauh lebih teliti dan sistematis. Pada titik ini, laporan keuangan desa seharusnya menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga informatif dan akuntabel (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang dalam beberapa tahun terakhir menerima dan mengelola alokasi dana desa yang cukup besar. Aktivitas pengelolaan dana desa yang semakin kompleks memerlukan sistem pelaporan keuangan yang lebih jelas, lengkap, dan transparan agar masyarakat dapat memahami arah pembangunan desa dan menilai kinerja pemerintah desa. Namun, belum banyak kajian yang menelaah bagaimana laporan keuangan desa berperan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Gondowangi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian mengenai peran laporan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Gondowangi menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian adalah Mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Gondowangi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi pelaporan keuangan desa serta menilai efektivitasnya sebagai instrumen akuntabilitas publik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat praktik transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini dirancang untuk menganalisis peran laporan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Dua variabel utama digunakan sebagai fokus analisis, yaitu peran laporan keuangan desa yang dipahami sebagai fungsi laporan dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan, serta transparansi pengelolaan dana desa yang menekankan keterbukaan informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat (Berliani et al., 2024).

Penelitian ini dilakukan di Desa Gondowangi yang dipilih secara purposif karena desa tersebut menerima dana desa dalam jumlah signifikan setiap tahun dan memiliki dinamika menarik dalam proses penyusunan serta penyampaian laporan keuangan. Subjek penelitian mencakup perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana desa. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pengawasan, atau pemanfaatan laporan keuangan desa. Responden terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, tiga anggota BPD, serta tiga tokoh masyarakat yang dianggap representatif untuk memberikan data relevan terkait transparansi.

Data penelitian meliputi data kualitatif berupa kondisi pengelolaan dana desa, proses penyusunan laporan keuangan, serta aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Data kuantitatif digunakan sebagai pelengkap, seperti jumlah dana desa dan realisasi anggaran. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berupa dokumen APBDes, laporan keuangan, notulen rapat, dan dokumen administratif lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan responden yang telah ditentukan, observasi langsung terhadap proses pelaporan dan publikasi informasi keuangan desa, serta pengumpulan dokumen resmi yang mendukung analisis (Sumarsono et al., 2019).

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilah data relevan terkait peran laporan keuangan dan praktik transparansi. Tahap kedua adalah penyajian data melalui interpretasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk menggambarkan pola dan hubungan antar-temuan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi bagaimana laporan keuangan desa berkontribusi terhadap keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, efektivitas pengelolaan dana, serta akuntabilitas pemerintah desa. Melalui rangkaian prosedur tersebut, metode penelitian ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami hubungan antara laporan keuangan desa dan transparansi pengelolaan dana desa dalam konteks pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gondowangi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berada pada ketinggian sekitar 450 meter dengan topografi dataran perbukitan dan iklim sejuk. Wilayahnya seluas 418,6 hektare yang terdiri atas 92 hektare tanah sawah dan 326,6 hektare tanah nonsawah. Desa ini berbatasan dengan Sukodadi dan Sidorahayu di utara, Parangargo di timur, Mendalanwangi di selatan, dan Pandanrejo di barat. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani jagung, jamur, ubi, dan buah-buahan, disertai pekerjaan sebagai buruh, pekerja pabrik, dan pelaku UMKM. Desa juga memiliki BUMDes yang mengelola sumber air dan layanan persampahan. Kehidupan sosial masyarakat masih kuat dengan budaya gotong royong.

Jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 8.413 jiwa, terdiri dari 3.790 laki-laki dan 4.623 perempuan, tersebar di empat dusun yaitu Gedangan, Dauan Rekesen, Wiloso, dan Pobener. Secara administratif, desa terbagi menjadi 6 RW dan 37 RT. Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa Danis Setya Budi Nugroho, dibantu Sekretaris Desa dan perangkat kaur yang menangani administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, ketertiban, dan kesejahteraan. Selain itu, terdapat empat kepala dusun yang memimpin wilayah masing-masing.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi dana desa diwujudkan melalui forum Musdes dan Musrenbangdes serta penggunaan media digital seperti WhatsApp. Akses informasi anggaran dinilai terbuka meskipun masyarakat tidak terlibat langsung dalam penyusunan teknis laporan. Dari sisi efektivitas, pengelolaan dana desa mengikuti alur birokrasi yang sistematis, mulai usulan dusun hingga verifikasi kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang desa. Koordinasi pemerintah desa dan BPD membantu memastikan program berjalan meskipun menghadapi kendala teknis. Secara keseluruhan, perencanaan anggaran menerapkan pendekatan partisipatif melalui Musdes dan Musdes, sehingga alokasi APBDes mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Gondowangi menunjukkan tingkat transparansi tinggi melalui keterbukaan informasi, partisipasi warga, serta ketertiban administratif dalam pengelolaan keuangan desa.



Gambar 1. Balai Desa Gondowangi
(Sumber: Dokumentasi di Desa Gondowangi)

Tahap Perencanaan

Desa menerapkan pendekatan partisipatif berbasis bottom up melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa untuk memastikan aspirasi warga menjadi dasar dalam penyusunan APBDes dan RKPDes. Mekanisme ini didukung keterbukaan informasi melalui forum resmi dan media digital, sehingga perencanaan desa benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat dan sesuai amanat regulasi nasional.

Tahap Pelaksanaan

Efektivitas pengelolaan keuangan Desa Gondowangi terlihat dari kemampuan pemerintah desa merealisasikan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Program Padat Karya Tunai (PKT) menjadi bukti efektivitas ini karena mampu melibatkan tenaga lokal dalam pembangunan fisik tanpa kontraktor luar, sehingga perputaran dana tetap di desa, ekonomi lokal menguat, dan pengangguran musiman berkurang. Efektivitas juga tercermin dari perencanaan partisipatif melalui Musdus dan Musdes yang memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan warga, seperti pembangunan drainase, sistem pembuangan limbah, serta penanganan banjir. Program kesejahteraan, khususnya BLT-DD, memperlihatkan daya serap tinggi, termasuk realisasi 84 persen untuk penanganan bencana dan kebutuhan mendesak sebagai instrumen perlindungan sosial.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan sangat tinggi karena warga terlibat aktif sejak identifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan fisik pembangunan melalui pola swakelola. Peran Kepala Dusun dan TPBJ memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat. Pemahaman masyarakat juga meningkat melalui strategi komunikasi yang inklusif, mulai dari penyederhanaan bahasa dalam IPPD, penggunaan infografis APBDes di ruang publik, hingga penyebaran informasi melalui grup WhatsApp tiap dusun. Kombinasi penyederhanaan informasi, visualisasi data, dan digitalisasi membuat data keuangan lebih mudah dipahami publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Tahap Penatausahaan

Validitas transparansi keuangan Desa Gondowangi diperkuat oleh ketertiban administratif dan pemanfaatan teknologi, terutama melalui penggunaan Siskeudes sebagai sistem standar nasional untuk perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan desa. Sistem ini meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus memastikan seluruh proses sesuai standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang disusun desa, seperti RAPBDes, APBDes, laporan realisasi, laporan aset, laporan kegiatan pembangunan, dan administrasi kas, berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas bagi BPD, masyarakat, serta pemerintah daerah. Seluruh kegiatan wajib disertai SPJ, meskipun penyusunan laporan akhir tahun sering dilakukan secara intensif pada bulan Desember karena padat agenda desa.

Pengelolaan keuangan dijalankan melalui struktur yang jelas, mulai dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Desa sebagai penyusun RAPBDes dan koordinator administrasi, Kaur Keuangan sebagai pembukuan teknis, hingga pelaksana kegiatan sebagai pengguna dana operasional. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan Inspektorat. Pada tahun anggaran 2024, penerimaan desa mencapai lebih dari Rp 2 miliar, didominasi pendapatan transfer di atas 95 persen. Seluruh transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum dan Siskeudes untuk menjaga akuntabilitas.

Pengeluaran desa dilakukan secara transparan dengan verifikasi berlapis, dimulai dari pengajuan kegiatan, pemeriksaan administratif, hingga pencairan oleh bendahara. TPBJ membantu survei harga

waktu menyiapkan seluruh dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Pemeriksaan Inspektorat terakhir dilakukan pada 2023 dan dapat bersifat rutin atau berdasarkan kebutuhan program tertentu. Prosedurnya berlangsung sistematis mulai dari persiapan dokumen, pemeriksaan administratif termasuk SPJ yang biasanya dipusatkan di kantor kecamatan, hingga verifikasi fisik di lapangan untuk memastikan kesesuaian kondisi nyata dengan laporan yang disusun. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kasi Kesejahteraan yang menegaskan bahwa meskipun pemeriksaan tidak selalu dilakukan setiap tahun, alurnya tetap mengikuti standar pemeriksaan pemerintah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran desa.

Tahap Pertanggungjawaban

Siklus transparansi ditutup dengan mekanisme pelaporan yang akuntabel. Laporan realisasi APBDes menyajikan perbandingan faktual antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Berikut adalah data rekapitulasi laporan keuangan yang menunjukkan keterbukaan pemerintah desa terhadap surplus maupun defisit anggaran.

Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes Desa Gondowangi Tahun Anggaran 2025 (Pasca Perubahan)

Komponen Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
A. Pendapatan	2,008,683,301.00	1,873,833,529.50	134,849,771.50
Pendapatan Asli Desa	84,126,000.00	18,000,000.00	66,126,000.00
Pendapatan Transfer	1,921,344,688.00	1,851,083,747.00	70,260,941.00
Pendapatan Lain-lain	3,212,613.00	4,749,782.50	1,537,169.50
B. Belanja	1,796,309,426.67	1,475,989,207.07	320,320,219.60
Penyelenggaraan Pemerintahan	860,117,086.67	646,855,606.07	213,261,480.60
Pelaksanaan Pembangunan	502,947,325.00	432,455,448.00	70,491,877.00
Pembinaan Kemasyarakatan	265,346,000.00	258,231,138.00	7,114,862.00
Pemberdayaan Masyarakat	20,288,000.00	14,236,000.00	6,052,000.00
Penanggulangan Bencana	147,611,015.00	124,211,015.00	23,400,000.00
C. Surplus / (Defisit)	212,373,874.33	397,844,322.43	-185,470,448.10
D. Pembiayaan Netto	-212,373,874.33	14,726,125.67	-227,100,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)		0	412,570,448.10

Sumber Data: Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Gondowangi Tahun Anggaran 2025 (Printed 19/11/2025).

Laporan Realisasi APB Desa (Setelah Perubahan), tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pelaksanaan Belanja Desa Gondowangi T.A. 2025

Bidang Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	860,117,086.67	646,855,606.07	75.20%	Cukup Efektif
Pelaksanaan Pembangunan Desa	502,947,325.00	432,455,448.00	85.98%	Efektif
Pembinaan Kemasyarakatan	265,346,000.00	258,231,138.00	97.32%	Sangat Efektif
Pemberdayaan Masyarakat	20,288,000.00	14,236,000.00	70.17%	Cukup Efektif

Penanggulangan Bencana & Mendesak	147,611,015.00	124,211,015.00	84.15%	Efektif
Total	1,796,309,426.67	1,475,989,207.07	82.17%	Efektif

Sumber Data: Diolah dari Laporan Realisasi APBDes per 19/11/2025.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa masih menyisakan anggaran dari alokasi Siltap dan tunjangan dua bulan terakhir yang belum dicairkan. Pada bidang pembangunan, sebagian besar proyek fisik seperti paving, drainase, dan rabat beton telah terlaksana sesuai jadwal dengan realisasi tinggi. Pembinaan kemasyarakatan mencatat serapan tertinggi karena dominasi kegiatan budaya dan adat, sedangkan pemberdayaan masyarakat menjadi yang terendah akibat beberapa program pelatihan akhir tahun yang belum terlaksana penuh. Pada bidang penanggulangan bencana dan kebutuhan mendesak, BLT-DD tersalurkan rutin kepada keluarga penerima manfaat. Secara keseluruhan, rasio serapan 82,17% mencerminkan manajemen arus kas yang sehat, sementara sisa 17,83% masih diperlukan untuk operasional serta penyelesaian administrasi akhir tahun. Pembinaan kemasyarakatan menjadi anomali positif dengan serapan 97%, selaras dengan identitas desa berbasis budaya (Fitriyanti, 2022).

Efektivitas juga terlihat dari fleksibilitas pemerintah desa dalam melakukan perubahan anggaran. Pada RAB Perubahan, pembangunan jalan usaha tani mengalami efisiensi besar karena anggaran awal yang melebihi seratus juta rupiah dapat ditekan menjadi sekitar empat puluh enam juta rupiah melalui penyesuaian volume dan harga satuan tanpa mengurangi kegiatan utama. Penghematan ini memberi ruang bagi desa untuk mengalihkan dana ke pos prioritas melalui SiLPA. Sementara itu, anggaran ATK dan operasional tidak mengalami perubahan berarti, menunjukkan akurasi perencanaan awal. Data RAB Perubahan dan realisasi anggaran menegaskan bahwa transparansi, terutama pada rincian harga dan volume, sangat menentukan efektivitas karena memungkinkan rasionalisasi anggaran pada pos yang belum mendesak, mencegah pemborosan, dan memastikan alokasi tetap tepat sasaran.

Tabel 3. Tingkat Realisasi Belanja (Per November 2025)

Bidang Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Penyerapan	Kategori Kinerja
Pembinaan Kemasyarakatan	265,346,000.00	258,231,138.00	97.32%	Sangat Efektif
Pelaksanaan Pembangunan	502,947,325.00	432,455,448.00	85.98%	Efektif
Penanggulangan Bencana	147,611,015.00	124,211,015.00	84.15%	Efektif
Penyelenggaraan Pemerintahan	860,117,086.67	646,855,606.07	75.21%	Cukup Efektif
Pemberdayaan Masyarakat	20,288,000.00	14,236,000.00	70.17%	Cukup Efektif
Rata-rata Total	1,796,309,426.67	1,475,989,207.07	82.17%	Efektif

Tingkat realisasi 82,17% dan capaian 97,32% pada bidang kemasyarakatan menunjukkan bahwa transparansi mendorong disiplin kinerja karena program yang informasinya dibuka ke publik cenderung terlaksana lebih baik akibat pengawasan masyarakat. Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa tidak hanya menjadi tugas Kepala Desa, tetapi juga seluruh perangkat sesuai fungsi masing-masing, di mana Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan menyusun laporan melalui aplikasi Siskeudes, sementara Kaur dan Kasi lain menyediakan laporan kegiatan untuk direkapitulasi sebelum diverifikasi dan ditandatangani Kepala Desa. Desa Gondowangi juga memenuhi kewajiban pelaporan melalui Laporan Realisasi APBDesa, LRK, LPPD, LKPPD, dan IPPD yang disesuaikan dengan tujuan dan penerima laporan, serta memperkuat transparansi melalui publikasi infografis APBDesa dalam bentuk baliho dan penyebaran informasi via WhatsApp dusun agar warga dapat memantau perkembangan pembangunan. Visi dan misi desa menjadi dasar seluruh program sehingga pertanggungjawaban yang disusun mencerminkan keterkaitan antara kegiatan seperti infrastruktur, posyandu, pelatihan ekonomi, dan gotong royong dengan arah pembangunan desa, sementara partisipasi warga memastikan laporan mencerminkan capaian nyata. Praktik tata kelola ini ditopang oleh standar pencatatan melalui aplikasi Siskeudes serta media visual dan digital yang membuat informasi anggaran mudah dijangkau, meskipun

masih terdapat hambatan seperti ketergantungan pada operator Siskeudes, perubahan kebijakan yang memaksa refocusing anggaran, dan penumpukan beban administrasi di akhir tahun yang dapat menurunkan ketelitian penyusunan laporan (Juniarti & Inapty, 2022).

SIMPULAN

Transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Gondowangi menunjukkan kinerja yang kuat melalui kombinasi publikasi fisik dan digital, penyajian RAB yang rinci, serta penyusunan IPPD yang mudah dipahami. Tingkat realisasi belanja mencapai 82,17% dengan serapan tertinggi pada bidang kemasyarakatan sebesar 97,32%, sementara rincian harga yang terbuka memungkinkan efisiensi anggaran fisik hingga Rp 201,28 juta melalui refocusing tanpa menurunkan kualitas kegiatan. Program perlindungan sosial seperti BLT-DD dan penanganan stunting tetap terjaga sebesar Rp 198,06 juta, menunjukkan ketepatan sasaran meskipun terjadi pemangkasan pada proyek fisik. Partisipasi masyarakat berlangsung substantif melalui musyawarah, pelaksanaan swakelola, dan pengawasan pembangunan, sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan warga. Namun, masih terdapat kendala seperti ketergantungan pada kompetensi operator Siskeudes dan perubahan regulasi yang kerap memicu revisi mendadak serta menambah beban administrasi akhir tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh dosen civitas akademika Universitas Merdeka Malang terutama prodi akuntansi yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Ajwa, S., Hanifah, K. N., & Mangkurat, U. L. (2024). Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *DIRASAH*, 7(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Dewi, M., & Nugrahanti, T. P. (2025). AUDIT FINDINGS SEBAGAI MEKANISME PERUBAHAN PADA AKUNTABILITAS DAN KINERJA ORGANISASI: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 214–224.
- Dwi Pramudita, I., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 7, Issue 1).
- Edelwis, A. (2022). *PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUAIN KANAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG*.
- Faadillah Herindraningrum, F., & Yuhertiana, I. (2021). *KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW*. 12(2).
- Febriansyah, A., Eriswanto, E., Kartini, T., & Studi Akuntansi, P. (2020). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)*.
- Fitriyanti, A. (2022). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT* (Vol. 2, Issue 1).
- Juniarti, U., & Inapty, B. A. (2022). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LABUHAN HAJI DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING* (Vol. 2, Issue 3).
- Mojo, A., & Rahayu, Y. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA*.

- Pasya, D. A. A., & Handoko, L. H. (2025). Apa yang mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap Organisasi Pengelola Zakat: Sebuah Kajian Systematic literature review. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.10194>
- Sumarsono, E., Purnomo, M. E., & Id, E. C. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(2). www.uniba.ac.id